

EVALUASI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL DALAM PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI PROVINSI JAWA TENGAH

Tazkia Rizky Widiani, Dyah Lituhayu, Endang Larasati Setianingsih

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (027) 7465407 Faksimile (024)7465402

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Banyaknya populasi gelandangan dan pengemis di Provinsi Jawa Tengah yang diakibatkan sulit terpenuhinya kebutuhan hidup dan ketidakmampuan bersaing untuk memiliki mata pencaharian normatif. Hal ini perlu diberikan penanganan melalui kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan dilaksanakan oleh Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo. Namun, masih ditemukannya penerima manfaat purna bina yang belum dapat mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak program rehabilitasi sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis dan menganalisis faktor penghambat yang terjadi. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya program rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo dilihat dari empat kategori dampak yaitu dampak psikologis, dampak ekonomi, dan dampak lingkungan hidup belum dapat tercapai keberfungsian sosialnya. Tetapi, penerima manfaat purna bina merasakan secara positif dari dampak sosial. Faktor penghambat seperti keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, durasi waktu program yang singkat, metode pelaksanaan kegiatan program hanya berfokus pada hasil, dan pelaksanaan program rehabilitasi sosial yang bersifat *top down*. Saran yang diberikan adalah pemberian program rehabilitasi sosial disesuaikan dengan kebutuhan penerima manfaat, melibatkan para stakeholder yang berpengalaman, dan meningkatkan kerjasama lintas sektor untuk mengembangkan program rehabilitasi sosial.

Kata Kunci: Gelandangan, Pengemis, Evaluasi, Rehabilitasi Sosial

ABSTRACT

The large population of homeless and beggars in Central Java Province is caused by the difficulty of meeting the necessities of life and the inability to compete to have a normative livelihood. This needs to be handled through the policy of the Central Java Provincial Regulation Number 6 of 2015 concerning the Implementation of Social Welfare which is carried out by the PGOT Mardi Utomo Social Service Institution. However, there are still beneficiaries who are not yet able to be independent. This study aims to evaluate the impact of the social rehabilitation program on handling homeless people and beggars and to analyze the inhibiting factors that occur. The method used is descriptive qualitative method. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The results showed that with the existence of a social rehabilitation program carried out by the PGOT Mardi Utomo Social Service Institution, seen from four categories of impacts, namely psychological

impacts, economic impacts, and environmental impacts, social functioning could not be achieved. However, beneficiaries of the post-management program feel positively from the social impact. Inhibiting factors include limited budget and human resources, the program's short duration, the method of implementing program activities that focus only on results, and the implementation of a top-down social rehabilitation program. The advice given is the provision of social rehabilitation programs tailored to the needs of beneficiaries, involving experienced stakeholders, and increasing cross-sector collaboration to develop social rehabilitation programs.

Keywords: Homeless, Beggars, Evaluation, Social Rehabilitation

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan problematika utama yang terdapat berbagai jenis dimensi yang menjadikan suatu objek dalam setiap masalah. Permasalahan kemiskinan merupakan suatu situasi yang tidak diharapkan bagi sebagian besar masyarakat umum untuk dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya. Dengan bertambahnya jumlah penduduk miskin, maka berpengaruh besar pada terjadinya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) (Handayani & Maruf, 2019).

Pada kehidupan sehari – hari, istilah PMKS dapat dilihat secara spesifik yaitu pengemis, gelandangan dan orang terlantar yang digunakan untuk merujuk bagi sebagian orang yang sering berada di jalanan untuk dapat mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan dirinya. PGOT ini akan menimbulkan permasalahan sosial lainnya yang dapat menyebabkan ketidakteraturan sosial yang terjadi pada masyarakat seperti tidak tertib dan

mengganggu pemandangan kota maupun daerah yang disinggahi dari orang jalanan tersebut (Bharoto & Nursahidin, 2021).

Provinsi Jawa Tengah adalah salah satu provinsi di Pulau Jawa yang memiliki banyak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mencari tempat tinggal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jumlah PMKS yang selalu hadir di tengah masyarakat, maraknya PMKS dapat menimbulkan terjadinya kerawanan sosial dan akan menggelisahkan ketertiban serta keamanan yang terjadi pada masyarakat.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai peranan yang penting dalam merumuskan kebijakan yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang menyatakan bahwa “Rehabilitasi Sosial merupakan proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat.” Dengan adanya rehabilitasi sosial bertujuan untuk

pemulihan dan pengembangan seluruh keahlian seseorang yang mengalami disfungsi sosial sehingga mereka dapat melakukan fungsi sosial dengan baik.

Dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 telah terdapat strategi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yaitu penyelenggaraan rehabilitasi sosial dasar melalui Panti Pelayanan Sosial. Panti sosial yang melakukan penanganan PMKS yang berfokus pada Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar adalah Panti Pelayanan PGOT Mardi Utomo Semarang.

Akan tetapi, dalam menjalani pelaksanaan program rehabilitasi sosial melalui Panti Pelayanan PGOT Mardi Utomo Semarang terdapat adanya permasalahan untuk

No	Keterangan	Tahun		
		2020	2021	2022
1	2	3	4	5
1.	Sudah Bekerja/Mandiri	29	35	46
2.	Kembali ke Masyarakat	50	34	33
3.	Masih di Bina/Rujuk antar Panti/Sekolah	31	41	31

menanggulangi permasalahan gelandangan dan pengemis. Dalam pemberian program rehabilitasi sosial ditemukan adanya, sebagian besar yang memperoleh program rehabilitasi sosial merupakan kriteria jenis penerima manfaat gelandangan. Hal ini dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2022 jumlah gelandangan yang berada Panti

Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo mencapai 100 orang.

Tabel 1. Jumlah Penerima Manfaat yang Lebih Dari Sekali Masuk Ke PPS PGOT Mardi Utomo Selama Tahun 2019 - 2022

Tahun	Gelandangan	Pengemis	Orang Terlantar	Total
2019	0	0	0	0
2020	1	0	-	1
2021	4	1	-	5
2022	8	1	1	10

Sumber: PPS PGOT Mardi Utomo, 2023

Permasalahan lainnya ditemukan bahwa terdapat jumlah penerima manfaat yang lebih dari sekali masuk pada 4 tahun terakhir yang selalu mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa penerima manfaat purna bina yang telah selesai memperoleh program rehabilitasi sosial ini belum mampu untuk mencapai keberfungsian sosial yaitu kemandirian. Sehingga, dari data yang dijelaskan tersebut menjadikan sebagai salah satu alasan untuk berfokus pada kriteria jenis PGOT yaitu gelandangan dan pengemis.

Tabel 2. Jumlah Penerima Manfaat yang Sudah bekerja atau Kembali ke Masyarakat dan Masih Dibina Selama Tahun 2020- 2022

Sumber: PPS PGOT Mardi Utomo, 2023

Program rehabilitasi sosial diharapkan dapat memberikan keberfungsian sosial bagi penerima manfaat purna bina yang

salah satunya adalah dapat mandiri dengan berperilaku sesuai kaidah dan norma hukum belaka. Jumlah penerima manfaat yang sudah bekerja selama tahun 2020 yaitu 29 orang atau 26,3%, tahun 2021 mencapai 35 orang atau 31,8% dan tahun 2022 mencapai 46 orang atau 41,8%. Sehingga, hal ini berarti jumlah penerima manfaat yang sudah bekerja atau mandiri yang telah selesai memperoleh program rehabilitasi sosial belum mencapai 100%.

Jumlah penerima manfaat yang melebihi jangka waktu penerimaan pelayanan selama tahun 2019 – 2022, sebagian besar dialami oleh jenis kriteria PGOT yaitu gelandangan dan pengemis. Hal ini dapat dikatakan jumlah mereka yang cukup besar untuk melebihi waktu tersebut. Dengan melebihi jangka waktu penerimaan pelayanan dapat diindikasikan bahwa penerima manfaat purna belum dapat mencapai kemandirian untuk purna bina supaya dapat mampu menerapkan segala kegiatan program rehabilitasi sosial.

Berdasarkan pengamatan awal peneliti, Berdasarkan pengamatan awal melalui wawancara lisan dengan Pekerja Sosial Professional Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo. Hal ini dapat dijelaskan bahwa masih ditemukannya penerima manfaat purna bina yang kembali menjadi gelandangan dan pengemis. Sehingga, hal ini belum selaras dengan tujuan dari

program rehabilitasi sosial yaitu untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar seperti mandiri, mampu menangani permasalahan sendiri dan berpartisipasi dengan lingkungannya.

Berdasarkan permasalahan yang telah dicantumkan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak program rehabilitasi sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Provinsi Jawa Tengah menggunakan teori Dampak Individual Finterbusch dan Motz beserta menganalisis faktor penghambat program rehabilitasi sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis menggunakan teori 5 unsur manajemen George R. Terry.

B. TINJAUAN TEORI

Administrasi Publik

Menurut Chandler dan Plano (dalam Keban, 2014:3) Administrasi publik merupakan suatu mekanisme yang dimana sumber daya dan petugas pemerintahan secara teorganisasi dan terkordinasi untuk melakukan formulasi, implementasi dan mengatur ketetapan dan kebijakan publik.

Kebijakan Publik

Menurut Chandler and Plano (dalam Keban, 2014:60), kebijakan publik merupakan suatu penggunaan yang terarah mengenai setiap sumber daya untuk

menyelesaikan permasalahan pemerintahan maupun publik. Hal ini dapat dijelaskan bahwa adanya arahan dari pemerintah untuk dapat membantu dan mengikutsertakan dalam pemerintahan agar tetap memiliki kehidupan yang baik.

Evaluasi Kebijakan

Menurut Anderson (dalam Winarno, 2012:229) menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan merupakan aktivitas yang berkaitan dengan penilaian suatu kebijakan yang terdiri dari substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut. Evaluasi kebijakan dapat diperuntukkan untuk dapat mengetahui penyebab kegagalan suatu kebijakan atau mengetahui Suatu kebijakan telah berjalan sesuai dengan dampaknya. Evaluasi kebijakan dapat menjadi panduan mengenai evaluasi yang akan dilaksanakan.

Evaluasi Dampak

Menurut Finsterbusch dan Motz dalam Subarsono (2005:128) untuk melaksanakan evaluasi terhadap program yang akan dilaksanakan, terdapat metode evaluasi yang akan digunakan, yaitu sebagai berikut.

1. *Single program after-only* yaitu informasi yang diperoleh berdasarkan keadaan kelompok sasaran setelah pelaksanaan program.

2. *Single program before-after* yaitu informasi yang diperoleh dari perubahan keadaan sasaran baik sebelum maupun sesudah program.
3. *Comparative after-only* yaitu informasi yang dikumpulkan berdasarkan keadaan sasaran dan bukan sasaran program dari program yang dijalankan.
4. *Comparative before-after* yaitu informasi yang diperoleh berdasarkan efek program terhadap kelompok sasaran baik sebelum maupun sesudah implementasi program.

Menurut Finsterbusch dan Motz dalam (Anggara, 2014:282) terdapat adanya beberapa unit sosial yang terkena dampak kebijakan, yaitu sebagai berikut.

1. Dampak Individual
2. Dampak Organisasional
3. Dampak bagi Masyarakat
4. Dampak bagi lembaga dan sistem sosial.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Situs yang diperoleh oleh peneliti dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah dan Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi

Utomo Semarang. Dalam melakukan teknik pemilihan informan melalui yaitu teknik purposive sampling yang diperuntukkan pada Subkoordinator Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial dan Pekerja Sosial Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo. Penggunaan teknik snowball sampling digunakan untuk penerima manfaat purna bina Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo dan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Evaluasi Dampak Program Rehabilitasi Sosial Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Provinsi Jawa Tengah

1. Dampak Psikologis

Dampak psikologis dari Peraturan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggara Kesejahteraan Sosial ini diketahui bahwa pelaksanaan program rehabilitasi sosial dapat mengembalikan fungsi sosial mereka, salah satunya dari segi mental bagi para gelandangan dan pengemis. Dampak psikologis pada program rehabilitasi sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis berkaitan dengan perubahan pola pikir dan mental para penerima manfaat purna bina. Hal ini membutuhkan adanya intervensi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui program rehabilitasi sosial sesuai dengan peraturan yang

ditetapkan terdiri dari beberapa kegiatan seperti motivasi dan diagnosis psikososial dan konseling psikososial.

Dalam pemberian bentuk program motivasi dan diagnosis psikososial sesuai dengan peraturan, Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo dilakukan melalui bimbingan mental psikososial bertujuan untuk dapat memberikan tumbuhnya kondisi psikis penerima manfaat seperti mampu mengendalikan diri dan disiplin serta budi pekerti yang baik. Dalam pemberian bentuk program bimbingan sosial dan konseling psikososial, Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo dilakukan dengan memberikan kegiatan bimbingan advokasi. Bimbingan advokasi bertujuan untuk dapat menumbuhkan kondisi penerima manfaat dalam memberikan pentingnya kebutuhan advokasi sosial.

Kondisi pola pikir dan mental para penerima manfaat purna bina yang sebelum memperoleh program rehabilitasi sosial, mereka belum mempunyai kemampuan penyelesaian masalah yang baik. Pertama, mereka belum mengenali permasalahannya seperti keseluruhan purna bina masih memiliki karakter mental yang lemah untuk dapat mengenali permasalahannya. Kedua, belum menemukan solusi atas permasalahan yang baik. Berdasarkan hasil observasi dan

wawancara peneliti bahwa mereka memasuki Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo, karena berasal dari rekomendasi teman ataupun kerabat para gelandangan dan pengemis tersebut. Hal ini berbeda dengan tujuan yang seharusnya dimiliki, karena mereka hanya melihat balai sebagai tempat untuk tinggal dan memenuhi kebutuhan hidupnya.

Ketiga, kondisi saat ini menjadi kondisi yang diinginkan. Hal ini dapat dijelaskan bahwa kondisi ketika sebelum memperoleh program rehabilitasi sosial dengan memasuki Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo ini belum menjadi kondisi yang diinginkan sesuai dengan peraturan dan norma hukum yang berlaku pada lingkungan kehidupan bermasyarakat. Para gelandangan dan pengemis ini seharusnya dapat memiliki mental yang kuat untuk menghadapi suatu permasalahan.

Kegiatan program rehabilitasi sosial dapat memberikan dampak secara positif dan negatif bagi penerima manfaat purna bina ketika telah menyelesaikan program rehabilitasi. Hasil penelitian menunjukkan beberapa penerima manfaat merasakan dampak positif yang diantaranya terdapat 3 dari 6 penerima manfaat yang purna bina telah berhasil dapat mampu mengatasi permasalahannya sendiri dengan memiliki pola pikir dan mental yang baik untuk

menghadapi situasi yang terjadi. penerima manfaat dapat mampu mengetahui permasalahan yang dihadapi seperti untuk memulai dunia usaha yaitu sebagian penerima manfaat purna bina telah berhasil dengan mempunyai mental yang kuat untuk memiliki pola pikir dan mental yang normatif.

Mereka berusaha untuk mengatasi permasalahannya dengan tidak melalui cara yang mudah seperti memiliki mental jalaran. Maka, melalui program rehabilitasi sosial dituntut untuk dapat mengenali permasalahannya dengan Bimbingan Sosial dan Konseling Psikososial. Kondisi kemampuan penyelesaian permasalahan para penerima manfaat purna bina dapat diketahui dengan kesesuaian kondisi yang dialami menjadi kondisi yang diinginkan. Ketiga, menerapkan untuk melakukan perubahan pada kondisi saat ini menjadi kondisi yang diinginkan bagi penerima manfaat yang purna bina.

Keberhasilan program bagi ketiga informan tidak lepas dari suatu program rehabilitasi sosial yang dijalankan oleh Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo. Hal ini dapat dijelaskan bahwa mereka mampu mereka dapat menelusuri permasalahan yang mereka miliki dan menemukan solusinya atas permasalahan tersebut.

Berdasarkan 3 dari 6 penerima manfaat yang sudah purna bina belum mengalami dampak yang dirasakan untuk perubahan kondisi mental dan pola pikir yang baik melalui kemampuan menyelesaikan masalah. Hal ini dikarenakan penerima manfaat purna bina yang belum mampu untuk mengenali atau merumuskan masalah dengan baik. Dalam bimbingan sosial dan konseling psikososial untuk dapat menyelesaikan permasalahannya ini belum dapat dirasakan oleh penerima manfaat. Dalam pelaksanaannya kebijakan dari bentuk program bimbingan sosial dan psikososial oleh Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo, tidak memberikan saran yang tepat untuk penyelesaian masalah mereka.

Para penerima manfaat purna bina ini belum menemukan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan. Selain itu penerima manfaat purna bina tersebut juga tidak merasakan dampak dari segi mental karena Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo kurang memberikan motivasi yang baik kepada sebagian penerima manfaat purna bina. Sebagian penerima manfaat merasakan bahwa pemberian motivasi mereka tidak dapat mampu mengubah ataupun mendorong mereka.

Kondisi kemampuan penyelesaian permasalahan para penerima manfaat

purna bina dapat diketahui dengan kesesuaian kondisi yang dialami menjadi kondisi yang diinginkan. Ketiga, belum berubahnya kondisi sekarang menjadi kondisi yang diinginkan, karena para penerima manfaat hingga kini lebih memilih untuk bekerja sebagai badut jalanan. Hal ini disebabkan karena sulitnya merubah pola pikir dan mental kehidupan jalanan yang telah melekat lebih memilih jalan yang pintas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dampak psikologis pada program rehabilitasi sosial yang ini belum dapat mendorong perubahan pola pikir dan mental penerima manfaat purna bina. Hal ini dapat dilihat dari bahwa tidak adanya perubahan kondisi mental sebagian penerima manfaat purna bina yang masih memiliki mental yang lemah dengan tidak mampu berupaya untuk mengatasi permasalahannya sendiri.

2. Dampak Ekonomi

Dampak ekonomi dari Peraturan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggara Kesejahteraan Sosial melalui program rehabilitasi sosial ini dapat diketahui bahwa untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dengan kemandirian ekonomi melalui mata pencaharian normatif. Standar dalam mencapai kemandirian ekonomi bagi

penerima manfaat purna bina itu didasarkan pada kemampuan berinisiatif.

Dalam memberikan bentuk program rehabilitasi sosial sesuai dengan peraturan yang ditetapkan seperti bimbingan pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo dilakukan dengan memberikan bimbingan keterampilan kerja. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk memastikan bahwa penerima manfaat memiliki keterampilan kerja praktis dalam mata pencaharian normatif.

Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo juga memberikan bantuan dan asistensi sosial. Bantuan ini dilakukan kerja sama dengan Kementerian Sosial untuk memberikan bantuan yang bernama pelatihan Atensi Kementerian Sosial dengan memberikan bantuan – bantuan dalam mengembangkan usaha penerima manfaat.

Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo juga memberikan bimbingan resosialisasi yang bimbingan ini disalurkan pada kegiatan magang – magang pada suatu usaha. Bimbingan resosialisasi dilakukan dengan mempersiapkan para penerima manfaat supaya dapat mampu untuk menerima kembali diterima pada lingkungan kehidupan bermasyarakat serta

mempersiapkan keluarga dan masyarakat untuk menerima penerima manfaat.

Pada saat sebelum memperoleh kegiatan – kegiatan program rehabilitasi sosial keseluruhan penerima manfaat belum merasakan kemampuan berinisiatif yang baik untuk menjalani kehidupannya. Faktor penyebab mereka memilih gelandangan dan pengemis karena tidak mempunyai keterampilan dan pendidikan beserta juga tidak mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka juga belum mempunyai kemampuan berinisiatif dalam membaca kebutuhan pasar ataupun mengkalkulasi peluang yang dimilikinya., ini bisa disebutkan belum mampu untuk berinisiatif dalam memperoleh pekerjaan yang normatif sesuai dengan kaidah norma sosial yang berlaku.

Setelah memperoleh program rehabilitasi sosial, para penerima manfaat purna bina diharapkan dapat memiliki kemampuan inisiatif untuk dapat mencari pekerjaan mereka sendiri. Terdapat 3 dari 6 penerima manfaat purna bina mampu berinisiatif setelah memperoleh program rehabilitasi sosial seperti mampu memulai mendirikan usaha dan memiliki pekerjaan yang normatif. Sebagian penerima manfaat purna berhasil merasakan dampak dari program rehabilitasi sosial dengan dapat

berinisiatif untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Hal ini terjadi karena terdapat penerima manfaat purna bina yang mendapatkan bantuan atensi dari Kementerian Sosial untuk mengembangkan usaha. Terdapat penerima manfaat yang merasakan kegiatan resosialisasi dengan disalurkan pekerjaan. Penerima manfaat purna bina yang mampu menerapkan kegiatan pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan sebagai salah satu mata pencaharian normatif mereka.

Tidak semua penerima manfaat purna bina merasakan dampak untuk kemandirian ekonomi karena terdapat 3 dari 6 informan yang kembali bekerja di jalanan karena belum mempunyai kemampuan berinisiatif yang baik. Hal ini terjadi karena mereka belum dapat mempunyai kegigihan untuk berjuang dan tidak dapat membaca kebutuhan pasar. Mereka tidak mampu menjadi kondisi saat ini merupakan kondisi yang mereka inginkan yaitu bekerja sebagai badut jalanan yang merugikan norma dan hukum yang berlaku pada kehidupan masyarakat.

Penerima manfaat purna bina ini tidak dapat tercapai dampak ekonomis pada kehidupannya. Hal ini disebabkan karena mereka tidak merasakan kegiatan bimbingan resosialisasi untuk disalurkan

pekerjaan ataupun magang dan tidak diberikan bantuan untuk mempunyai ijazah ataupun sertifikat.

Para penerima manfaat purna bina juga tidak mendapatkan bantuan atensi untuk dapat mengembangkan usahanya sekaligus atensi sebagai pendampingan mengembangkan usaha. Sehingga, mereka ini belum mempunyai kemampuan mengatasi permasalahan perekonomiannya tanpa menggantungkan pada orang lain.

Penerima manfaat purna bina ini tidak merasakan kegiatan bimbingan pelatihan ini secara maksimal untuk dapat dipergunakan ketika setelah menyelesaikan program rehabilitasi sosial. Pelaksanaan bimbingan pelatihan dan pembinaan kewirausahaan juga hanya didasarkan pada ide dari Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo sendiri dibandingkan menyesuaikan pada kebutuhan penerima manfaat. Pelaksanaan pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan ini dijalankan kurang maksimal karena jadwal masing – masing kegiatan pelatihan hanya dilakukan sekali seminggu dan berlangsung dalam waktu yang relatif singkat.

Dampak ekonomi belum dapat tercapai oleh para penerima manfaat purna bina untuk dapat memiliki mata pencaharian

yang normatif melalui mengembangkan keterampilan selama proses layanan rehabilitasi sosial. Sehingga, dampak ekonomi belum berjalan maksimal sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

3. Dampak Sosial

Dampak sosial dari Peraturan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyeleggara Kesejahteraan Sosial ini diketahui bahwa dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar melalui mandiri berinteraksi dan berpartisipasi dengan lingkungannya. Dampak sosial pada program rehabilitasi sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis berkaitan pada perubahan perilaku, sikap ataupun pola kebiasaan hidup, dan kemandirian sosial dalam berinteraksi dengan orang lain.

Dalam pemberian dampak sosial membutuhkan intervensi lebih lanjut dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui program rehabilitasi sosial sesuai dengan peraturan yang ditetapkan untuk memberikan dampak sosial. Hal ini diantaranya terdiri dari beberapa kegiatan yaitu Bimbingan lanjut ini diberikan untuk dapat memastikan bahwa masyarakat dapat beradaptasi dengan baik pada lingkungan kehidupan bermasyarakat. Bimbingan mental dan spritual/keagamaan

bertujuan untuk meningkatkan keahlian para gelandangan dan pengemis dalam melaksanakan kegiatan keagamaan seperti ibadah.

Dalam melaksanakan bentuk program rehabilitasi sosial yaitu bimbingan sosial dan konseling psikososial, Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo dilakukan dengan melalui bimbingan sosial bertujuan untuk dapat memulihkan dan mengubah tingkah laku penerima manfaat.

Pada dampak sosial diketahui bahwa melihat kondisi sosial seperti sikap, perilaku dan pola kebiasaan hidup para penerima manfaat purna bina sebelum mengikuti program rehabilitasi sosial. Hal ini dapat dijabarkan bahwa keseluruhan penerima manfaat purna bina memiliki sikap, perilaku dan pola kebiasaan hidup yang buruk dan yang telah melekat pada kehidupan jalan. Hal ini diantaranya kebiasaan meminum keras, tidak mempunyai tingkatan kesabaran yang baik, melakukan perilaku tercela dan tidak memiliki disiplin waktu. Dengan permasalahan tersebut tentunya membutuhkan intervensi lebih lanjut untuk menghindarkan meresahkan lingkungan masyarakat sekitar.

Setelah memperoleh program rehabilitasi sosial, Keseluruhan penerima manfaat purna bina berhasil untuk mengalami

perubahan perilaku, sikap dan pola kebiasaan hidup yang baik. Hal ini diantaranya dapat memiliki sikap atau perilaku yang lebih sabar, ikhlas, bersahaja dan rendah hati. Perubahan perilaku tersebut terjadi karena program rehabilitasi sosial terutama bimbingan mental/spiritual dan sosial dan konseling psikososial yang memberikan siraman rohani kepada para penerima manfaat purna bina ini. Dengan mengikuti program rehabilitasi sosial bagi bimbingan mental dan spiritual tersebut dapat mendorong mereka untuk selalu berpikir positif.

Keberhasilan perubahan ini terlepas dari bimbingan sosial dan konseling psikososial. Bimbingan ini dapat memberikan pemahaman mengenai dirinya dan perilaku yang berkaitan pada lingkungan. Dengan tercapainya perubahan perilaku yang berawal dianggap telah menyimpang (patologis) menjadi normatif sesuai dengan peraturan dan norma hukum yang berlaku pada lingkungan kehidupan bermasyarakat.

Keseluruhan penerima manfaat purna bina mencapai kemandirian dalam berinteraksi dengan orang melalui cara menyikapi persoalan sosial dengan baik. Pertama, keseluruhan penerima manfaat purna bina ini dapat mengetahui permasalahan yang mereka alami karena penilaian negatif yang dialami pada lingkungan kehidupan

bermasyarakat. Pelaksanaan program bimbingan lanjut yang memastikan para penerima manfaat purna bina untuk dapat menjalankan peran sosialnya dengan baik tidak dilakukan secara maksimal. Terdapat masyarakat yang belum memperoleh program bimbingan lanjut sebagaimana untuk mengetahui bahwa penerima manfaat tersebut dapat berjalan dengan baik ataupun tanpa hambatan pada lingkungan sekitar.

Dalam mencapai kemandirian interaksi penerima manfaat purna bina dapat diketahui dengan cara mereka menemukan solusi yang dihadapi melalui permasalahan pandangan negatif yang diberikan oleh masyarakat. Hal ini menjadikan bahwa mereka selalu berproses berinteraksi sosial dengan orang lain dan tidak menghiraukan apapun yang berhubungan negatif atas dirinya. Kemandirian interaksi penerima manfaat purna bina ini tidak terlepas dari bimbingan sosial dan konseling psikososial.

Kondisi kemampuan penyelesaian permasalahan para penerima manfaat purna bina dapat diketahui dengan kesesuaian kondisi yang dialami menjadi kondisi yang diinginkan. Ketiga, mengubah kondisi saat ini menjadi kondisi yang diinginkan dengan kondisi cara menyikapi permasalahan dengan baik. Keseluruhan penerima manfaat purna bina

yang dapat mempunyai kondisi cara kemandirian interaksi orang lain yang baik.

Dengan demikian, penerima manfaat purna bina merasakan dampak sosial secara positif pada diri mereka seperti berperilaku positif, pola kebiasaan hidup yang disiplin dan cara mereka bersosialisasi yang baik setelah mengikuti program rehabilitasi sosial.

4. Dampak Lingkungan Hidup

Dampak lingkungan hidup pada program rehabilitasi sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis terkait dengan perubahan kondisi tempat tinggal setelah memperoleh program rehabilitasi sosial. Perubahan kondisi tempat tinggal dapat diketahui penerima manfaat purna bina untuk tidak kembali menggelandang dan mengemis.

Dalam memberikan dampak lingkungan hidup Hal ini terdiri dari beberapa kegiatan yaitu bimbingan sosial dan konseling psikososial. Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo dilakukan dengan melalui bimbingan advokasi. Bimbingan advokasi bertujuan untuk dapat menumbuhkan kondisi penerima manfaat dalam memberikan pentingnya kebutuhan advokasi sosial.

Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo dalam melaksanakan bimbingan

resosialisasi dilakukan dengan mempersiapkan para penerima manfaat. . Bimbingan tersebut dilaksanakan melalui pemantapan belajar dan bekerja untuk diterima pada masyarakat dan kesiapan untuk menentukan tempat tinggal mereka secara mandiri, biasanya mereka tinggal di kos/kontrakan dan dapat dikembalikan ke keluarga.

Pada dampak lingkungan hidup ini sebelum mengikuti program rehabilitasi sosial, keseluruhan penerima manfaat belum mempunyai kemampuan penyelesaian yang baik untuk memilih tempat tinggal yang baik bagi kebutuhan hidup dirinya dan keluarga. Keseluruhan para gelandangan dan pengemis ini belum mempunyai pengenalan masalah yang baik dengan berfokus untuk menentukan strategi yang tepat dalam menyelesaikan permasalahannya.

Mereka belum mengetahui cara yang baik dalam menyelesaikan permasalahan kondisi tempat tinggal sebagai jalan keluar atas permasalahan yang dihadapi. Mereka memutuskan untuk tinggal di Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo untuk dapat menikmati fasilitasnya dan terdapat beberapa mereka yang mengalami ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam menentukan hunian yang tepat bagi penerima manfaat purna bina akan bergantung dengan kondisi perekonomian yang dihadapi untuk dapat mencukupi biaya tempat tinggal. Terdapat 4 dari 6 penerima manfaat yang telah berhasil untuk mengatasi permasalahannya dan mengalami perubahan kondisi tempat tinggal. Para penerima manfaat purna bina ini dapat mengenali permasalahannya dengan mengatur strategi yang baik. Hal ini diantaranya seperti mengatur keuangan yang baik dengan berkeinginan untuk tidak tinggal di jalanan kembali.

Kemampuan penerima manfaat purna bina dapat diketahui dengan cara menemukan solusi yang dihadapi. Penerima manfaat purna bina dengan menabung dari hasil pekerjaannya ketika selama di Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo. Hal ini terjadi dari metode diskusi yang dilakukan pada bimbingan sosial dan konseling psikososial untuk memecahkan masalah mereka. Selain itu, terdapat penerima manfaat yang melakukan bimbingan resosialisasi dengan persiapan pada keluarganya dan lebih memilih untuk tinggal bersama orang tua.

Kondisi kemampuan penyelesaian permasalahan para penerima manfaat purna bina dapat diketahui dengan kesesuaian kondisi yang dialami menjadi kondisi yang diinginkan. Hal ini dapat

mengubah kondisi saat ini menjadi kondisi yang diinginkan dapat dijelaskan bahwa mereka berhasil untuk mengubah kondisi saat ini untuk tidak kembali tinggal di jalanan dan mempunyai hunian sebagai tempat tinggal mereka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya seperti tinggal di kos/kontrakan dan kembali bersama keluarga.

Terdapat penerima manfaat yang belum berhasil untuk mengubah kondisi perubahan tempat tinggal mereka secara mandiri dengan bergantung pada Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo. Hal ini dapat dijelaskan bahwa berdasarkan 2 dari 6 penerima manfaat purna bina telah mengenali permasalahannya untuk dapat memiliki tempat tinggal setelah memperoleh program rehabilitasi sosial.

Pemberian informasi dan konseling tidak sesuai dengan penyelesaian masalah para penerima manfaat purna bina dalam mengalami perubahan kondisi tempat tinggal. Penerima manfaat mencari tempat tinggal secara mandiri sesuai dengan kemampuan perekonomian mereka membiayai tempat tinggal tersebut. Minimnya bimbingan resosialisasi yang dilakukan oleh Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo yang seharusnya lebih meningkatkan kontribusinya dalam persiapan dan pengawasan kepada penerima manfaat purna bina.

Dampak lingkungan hidup dari program rehabilitasi sosial belum dapat tercapai keberfungsian sosialnya sebagaimana sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan untuk menjalani kehidupan sehari – hari.

B. Faktor Penghambat Program Rehabilitasi Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Provinsi Jawa Tengah

1. Man

Program rehabilitasi sosial mempunyai kendala dalam kekurangan jumlah sumber daya manusia yang berarti perbandingan antara pekerja sosial dengan penerima manfaat yang setara dengan satu banding sepuluh, karena pekerja sosial yang berada pada Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo hanya mencakup 5 orang dan harus mampu membina 110 penerima manfaat di dalamnya.

Kurangnya kualitas sumber daya manusia yang berupa pekerja sosial profesional untuk dapat memberikan kegiatan program rehabilitasi sosial terutama pada bimbingan motivasi dan diagnosis psikosional. Selain itu, belum mempunyai instruktur psikologis dalam memberikan pelayanan motivasi kepada para penerima manfaat.

2. Money

Dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial juga mengalami keterbatasan

anggaran untuk dapat mengupayakan pemberian dampak dari program tersebut bagi penerima manfaat purna bina. Akan tetapi, pada saat ini pelaksanaan program rehabilitasi sosial untuk bimbingan keterampilan dalam mengupayakan pengembangan kemampuan penerima manfaat hanya terbatas dalam kurun waktu satu tahun yang mencapai 1.2 juta. Anggaran yang diberikan hanya diperuntukkan bagi pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan tidak ada anggaran lain untuk pelaksanaan kegiatan bimbingan pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan.

3. Methods

Pelaksanaan program rehabilitasi sosial terutama pada kegiatan pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan yang diharapkan dapat menjalani mata pencaharian normatif sesuai dengan kemampuan dan minat. Program rehabilitasi sosial yang dijalankan oleh Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo cenderung bersifat *top down* yang menjadi faktor utama keberjalanan program rehabilitasi sosial tidak efektif kepada para penerima manfaat purna bina. Hal ini dikarenakan dalam penerapan program rehabilitasi sosial, kegiatannya tidak sesuai dengan kebutuhan permasalahan para penerima manfaat purna bina.

Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo yang lebih berfokus pada hasil, tidak berfokus pada dampak yang dihasilkan. Akibat dari pelatihan tersebut menjadikan ketika para penerima manfaat purna bina telah menyelesaikan program rehabilitasi sosial. Hal ini terjadi pada penerima manfaat purna bina tidak diberikan penyaluran pekerjaan/magang dan sertifikat sebagai bukti untuk melamar pekerjaan. Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo lebih berfokus pada pemberian perubahan bagi penerima manfaat yang purna bina dan ketika mereka telah purna bina bukan tanggung jawab dari Panti itu sendiri.

Selain itu, beberapa dari mereka juga diberikan bantuan atensi sosial dari Kementerian Sosial untuk dapat mendirikan usaha. Dalam pemberian bantuan usaha juga harus membutuhkan perhatian yang seksama karena mental individu yang terbiasa di jalanan, menjadikan pemerintah meningkatkan kewaspadaan. Dengan kegiatan program rehabilitasi yang tidak berfokus pada dampak, dapat mengakibatkan para penerima manfaat yang telah menyelesaikan program rehabilitasi sosial. Hal ini menjadikan banyak untuk turun kembali menjadi gelandangan ataupun pengemis.

Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo merasakan kurangnya jangka waktu pelayanan tersebut bahwa untuk dapat mengubah kondisi mereka sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan terutama kondisi mental mereka. Hal ini dikarenakan dalam pemberian pelayanan juga diharuskan untuk menyesuaikan pada kondisi penerima manfaat. Sehingga, jika pelayanan hanya diberikan dalam waktu terbatas, proses pelayanan akan kurang efektif dan banyak penerima manfaat purna bina akan kembali menjadi pengemis dan gelandangan.

KESIMPULAN

Pada dampak psikologi ini masih belum dirasakan oleh sebagian penerima manfaat purna bina untuk dapat mengalami perubahan. Sebagian penerima manfaat purna bina ditemukan kembali berada di jalanan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. kurangnya pemberian kegiatan motivasi dan diagnosis psikosional dalam mendorong terjadinya perubahan dari segi mental secara nyata bagi penerima manfaat purna bina. Pelaksanaan bimbingan sosial dan konseling psikososial yang diberikan juga hanya sebatas memberikan pemahaman dalam rangka mencapai kemampuan permasalahan yang telah diskusikan.

Pada dampak ekonomi ini masih kemandirian ekonomi dan tingkat penghasilan individu juga belum dirasakan. Sebagian penerima manfaat purna bina belum dapat mengalami perubahan karena kemampuan dalam penyelesaian masalah untuk berinisiatif yang kurang untuk ditingkatkan dan belum memiliki mata pencaharian normatif. karena tidak adanya penyaluran magang sesuai dengan bekal keterampilan yang diperoleh selama masa layanan. Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan beserta bantuan dan asistensi sosial yang diberikan belum dapat berdampak untuk dalam mengembangkan keterampilan dan usaha.

Dampak sosial ini dirasakan oleh para penerima manfaat purna bina yang terjadi perubahan sikap dan perilaku para penerima manfaat purna bina telah sesuai dengan norma dan kaidah hukum yang berlaku beserta pola kebiasaan hidup yang lebih teratur dan disiplin. Selain itu, kemandirian interaksi orang lain telah mampu mengatasi persoalan dengan baik. bimbingan mental/spiritual memberikan dorongan berpikir positif dan bimbingan sosial konseling psikososial yang memberikan dampak untuk memiliki kemampuan penyelesaian masalah yang baik dalam menghadapi permasalahan bersosialisasi.

Dampak lingkungan hidup ini belum dirasakan sebagian penerima manfaat purna bina yang belum mempunyai kemampuan menangani permasalahan yang baik. Sebagian penerima manfaat purna bina kembali tinggal dan belum dapat mandiri dengan memasuki Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo lebih dari 2 kali. Hal ini disebabkan karena minimnya bimbingan resosialisasi dalam persiapan purna bina yang akan menyelesaikan program rehabilitasi sosial. bimbingan konseling dan psikososial untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dirasa kurang untuk memberikan informasi.

Faktor penghambat pada program rehabilitasi sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis. Pertama, unsur *man* terdiri dari keterbatasan sumber daya manusia dari segi kualitas seperti kurangnya kemampuan pekerja sosial untuk memberikan kegiatan program. Segi kuantitas, kurangnya instruktur dan pekerja sosial untuk mencukupi kegiatan program rehabilitasi sosial. Kedua, unsur *money* kurangnya anggaran yang diberikan dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial terutama kegiatan pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan. Ketiga, unsur *methods* yang ditemukan terdapat pelaksanaan program rehabilitasi sosial yang bersifat

top down, Keterbatasan jangka waktu pelayanan, dan proses kegiatan program rehabilitasi sosial yang berfokus pada hasil, tidak berfokus pada dampak.

SARAN

- a. Perbaiki cara pelaksanaan program rehabilitasi sosial dengan menyesuaikan pada beragam kebutuhan bagi penerima manfaat. Dalam penanganan terdapat kompleksitas problematika yang perlu disesuaikan bagi kebutuhan masing – masing penerima manfaat. Selain itu, peningkatan jadwal pelaksanaan kegiatan program rehabilitasi sosial untuk dapat dipenuhi dan dicatat perkembangan masing – masing penerima manfaat
- b. Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo melakukan pengkajian lebih dalam mengenai penanganan metode yang tepat dan efektif. Dalam menangani persoalan gelandangan dan pengemis ini dengan melibatkan seluruh stakeholder yang terlibat dengan tenaga ahli yang sesuai pada bidangnya seperti psikolog dan instruktur pelatihan
- c. Peningkatan kerjasama lintas sektor dalam pengembangan kegiatan program rehabilitasi sosial dalam

penanganan gelandangan dan pengemis.

Dengan adanya kerjasama lintas sektor, maka dapat membentuk kegiatan program rehabilitasi sosial yang lebih inovatif dan beragam supaya penerima manfaat memperoleh ilmu dan ajaran yang baru untuk dapat diterapkan kepada dunia kerja dengan membawa perubahan yang baik bagi kehidupan sehari - hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anggara. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Desmita. 2012. *Psikologi Perkembangan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rohman, Abd. 2018. *Dasar – Dasar Manajemen Publik*. Malang: Empatdua Kelompok Instrans Publishing
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Keban, Yeremias. 2014. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

Jurnal Ilmiah

- Ardiana, Widha D. 2020. Evaluasi Program Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis [skripsi]. Yogyakarta (ID): Universitas Gajah Mada.
- Ariani, Cyntia Ratna A. (2018). Dampak Program Rehabilitasi Sosial Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Studi di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya Laras Yogyakarta) [skripsi]. Yogyakarta (ID): Universitas Gajah Mada.
- Handayani, N., & Ambarawati, G. A. (2019). Penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, 1-12.
- Maryatun, Santoso Tri Raharjo, B. M. T. (2022). Berbasis Panti Untuk Keberfungsian Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Ppks). *13*, 103–117.
- Mulia Astuti. (2016). Kemandirian Penerima manfaat purna bina Panti Sosial Bina Daksa Self Reliance Of Former Beneficiaries Of Panti Sosial Bina Daksa. *Sosio Kensepsia*, 5(200), 18–33.
- Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023.
- Sihombing, E. A. P., Yuliani, D., & Windriyanti, W. (2020). Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Bagi Gelandangan Dan Pengemis Di Balai Rehabilitasi Sosial Gelandangan Dan Pengemis Di Pulau Jawa. *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial (Rehsos)*, 2(2). <https://doi.org/10.31595/rehsos.v2i2.310>
- Sumarno, S., & Jayaputra, A. (2015). Kondisi Sosial Psikologis dan Ekonomi Abh Pasca Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Psmg Antasena, Magelang-Jawa Tengah. *Sosio Kensepsia*, 4(3), 123-141.
- Sumantri, I., Pikri, F., & Lubis, M. A. (2018). Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya Cisarua. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 10(1), 13–24. <https://doi.org/10.15575/jpan.v10i1.7622>

Dokumen

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.